



Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Analysis of the Application of Government Political Democracy and Social Welfare in Indonesia

Indar Arifin*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar. Indonesia

ARTIKEL INFO

* Corresponding author;
indararifin@gmail.com

Kata Kunci:

demokrasi;
politik pemerintahan;
kesejahteraan sosial;

democracy;
government politics;
social welfare;

ABSTRAK

Demokrasi, adalah sebuah sistem politik pemerintahan yang perlu diperjuangkan oleh rakyat, setelah kekuatan monarki dan oligarky dianggap tidak memadai untuk menjawab masalah kesejahteraan, kenyamanan, kebebasan berpendapat, dan berbagai kebebasan lainnya. Mungkin itulah kata kunci yang paling utama untuk memaknai penerapan demokrasi politik dan pemerintahan di Indonesia yang bertujuan akhir adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. From the people, by the people, for the people demikian kata Abraham Lincoln, yang kemudian menjadi konsep yang sangat dasar dan relevan untuk memadukan antara ideologi sebuah negara dan peta politik pemerintahan menuju cita cita tersebut. Demikian Idiologi sebuah Negara dan peta politik pemerintahan idealnya memiliki orientasi terhadap kesejahteraan Sosial, terlebih dinegara yang memiliki idiologi berkarakter keadilan sosial (Pancasila dengan sila kelimanya), dan memiliki komitmen sebagai negara kesejahteraan (welfare state) yang menitikberatkan pada kepentingan kesejahteraan warganegaraanya. Penerapan demokrasi yang dimaksud Abraham Lincoln tentu saja diharapkan dapat menyentuh kehidupan dan kesejahteraan (sosial) yang dimaksud, yakni dapat memperkecil kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, bukan hanya sebagai kiasan belaka dan menjadi mitos demokrasi dan kesejahteraan sosial bagi warganya.

Democracy, is a political system of government that needs to be fought by the people, after the power of the monarchy and the oligarchy is considered inadequate to answer the problems of welfare, comfort, freedom of speech, and various other freedoms. Maybe that's the most important key word to interpret the implementation of political democracy and governance in Indonesia with the ultimate aim of achieving social welfare. From the people, by the people, for the people, said Abraham Lincoln, who later became a very basic and relevant concept for combining the ideology of a country and the political map of government towards these goals. Thus the ideology of a country and the political map of the government should ideally have an orientation towards social welfare, especially in a country that has the ideology of social justice (Pancasila with its fifth precepts), and has a commitment as a welfare state that focuses on the interests of the welfare of its citizens. The application of democracy referred to by Abraham Lincoln is of course expected to be able to touch the life and welfare (social) in question, which can reduce the gap between the rich and the poor, not merely as a figure of speech and become a myth of democracy and social welfare for its citizens. Democracy is not a tool for the state to gain political benefits for the welfare of the elite.

PENDAHULUAN

Bukanlah hal sederhana untuk membedah demokrasi Vs kesejahteraan sosial rakyat. Perdebatan tentang keduanya sudah sejak lama menjadi perdebatan dikalangan Ilmu Sosial Politik maupun ilmu Ekonomi yang memiliki kaitan erat terhadap kesejahteraan, yang membawa serta unsur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara Kesejahteraan menjadi bagian dari komitmen negara sebagai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keduanya sering memunculkan perdebatan yang tak kunjung reda. Perdebatan itu mengacu pada pertanyaan adalah, apakah demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan sosial, atau kesejahteraan sosial justru yang menghasilkan demokrasi? Lalu apakah demokrasi adalah jalan satu satunya untuk mencapai kesejahteraan sosial? Perdebatan ini tentu saja akan bersifat spekulatif jika tidak didasari dengan pengetahuan dan analisis ilmiah yang memadai untuk menjawabnya.

Perdebatan itu mengingatkan kita pada Lipset (1969) dengan analisis klasiknya bahwa demokrasi hanya bisa berkembang baik apabila ditopang oleh warga yang berpendidikan memadai, serta kelas menengah kuat dan independen, dengan bertolak pada tesis yakni "semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin mungkin ia yakin dengan kedalaman nilai nilai demokrasi yang dapat mendukung praktek demokrasi". Lipset, menilai bahwa di negara negara yang berpenduduk miskin, dengan tingkat pendidikan yang rendah, buta aksara yang masih tinggi, institusi sosial-politik lemah, organisasi masyarakat sipil tak berfungsi dengan baik, maka demokrasi akan gampang dimanipulasi oleh elite elite politiknya yang oportunistis dan pemimpin despotik yang menawarkan janji-janji populisnya untuk duduk diberbagai struktur politik maupun publik pemerintahan, apakah itu sebagai wakil rakyat di parlemen, di puncak politik pemerintahan, ataupun pejabat karier dipemerintahan. Kemenangan Kekuasaan akan dijadikan sebagai "mesin pencetak uang" untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, untuk membayar berbagai ongkos politik yang digunakannya dalam kerja manipulasi politik yang telah dilakukannya. Meskipun Argumen Lipset disebut sebagai argumen klasik, akan tetapi memiliki

relevansi terhadap banyaknya fakta yang terjadi di Indonesia, selama kurun waktu sejak reformasi digulirkan, sementara keadaanpun memaksa bangsa kita untuk bekerja bersama-sama bersatu padu untuk bertaruh membangun demokrasi sebagai jalan yang harus diperjuangkan. Demikian juga Robert Dahl (1971) bahwa semakin tinggi tingkat sosial ekonomi suatu negara, akan semakin mungkin negara tersebut menjadi demokratis.

Sementara pada pandangan pencinta demokrasi, yang menilai demokrasi sebagai alat, sebagai jalan, tentulah tidak serta merta menerima tesis Lipset maupun Dahl. Demokrasi dianggap sebagai alat untuk menuju kepada pencapaian pertumbuhan orang berpendidikan tinggi, mengentaskan kemiskinan, mengurai konflik sosial, menghilangkan gap antara pemerintah dan yang diperintah dan lain sebagainya. Demokrasi sebagai jalan menuju ke arah keadilan dan kesetaraan. Demokrasi justru akan lebih mempermudah arah menuju tujuan, karena banyaknya akses yang akan terbuka untuk menuju pencapaiannya itu, dan hanya bisa dilalui melalui jalan demokrasi yang baik. Mengapa akses pendidikan dan lain sebagainya itu tertutup oleh bangsa? karena demokrasi sebagai jalan tidak dibuka, tidak diperbaiki, sehingga untuk mencapai tujuan yang dikehendaki tidak terwujud. Jika banyak ketimpangan sosial, keadilan sosial dan kesejahteraan sosial tidak mencapai wujudnya, itu adalah diakibatkan oleh tindakan politik pemerintahan yang tidak membuka akses terhadap demokrasi. Untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan sosial maka jawabannya adalah demokrasi.

Pandangan ini tentu saja menciptakan bantahan terhadap pandangan yang lebih mengedepankan kesejahteraan sosial dari demokrasi. Bagi pandangan ini menilai bahwa kesejahteraan sosial adalah tujuan, bukanlah alat. Jika demokrasi diperbaiki maka semua jalan menuju kesejahteraan sosial akan segera menjadi kenyataan yang bisa diraih.

Negara kesejahteraan (Welfare state) adalah merupakan cita cita dan komitmen pendiri negara. Cita-cita mulia pada pendiri bangsa, tentu saja memiliki alasan yang kuat, dimana keberadaan negara sangat dibutuhkan untuk membantu rakyat, dari keterpurukan pasca

perang melawan berbagai penjajahan di bumi Nusantara. Sebagai bangsa yang baru merdeka tentu tidaklah serta merta dapat berdiri dan mandiri tanpa kekuatan negara. Negara dianggap sebagai solusi untuk menjawab tantangan dan masalah mereka untuk bergerak maju bersama dengan negara-negara lain. Secara psikologikal dan historikal negara kesejahteraan (Welfare state) adalah merupakan kebutuhan rakyat yang harus menjadi pilihan dan komitmen bangsa, dan negara.

Negara, menjadi tulang punggung rakyat diberbagai aspek kehidupan sebagai sebuah logika sintesisnya. Kecendrungan ini tentu saja membutuhkan para pemimpin negara dari seluruh elemen yang kuat, memiliki jiwa kenegaraan yang tinggi, tanpa mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Sayangnya, kecendrungan ini juga akan membawa kecendrungan lain, yakni negara di bawah kekuasaan politik pemerintahan menjadi arogan, congkak, dan totaliter. Akibatnya kecendrungan ini membawa efek terjadinya otoritarian yang menguat ditingkat para elit kekuasaan. Tentulah menjadi miris kemudian, ketika konsep negara kesejahteraan terbawa arus ke "lembah" yang sama sekali bukan tujuannya. Kesejahteraan rakyat pun menjadi mitos, dibalik konsep negara kesejahteraan yang menjadi tujuannya, padahal konsep negara kesejahteraan sesungguhnya adalah, bagaimana negara membuat sistem ketatanegaraannya yang menitikberatkan kepada kepentingan kesejahteraan warga negaranya. Konsep idealnya adalah, negara wajib mensejahterahkan rakyatnya, terserah menggunakan sistem monarkhi, oligarkhi atau demokrasi sebagai pilihannya.

Indonesia cukup cerdas dan berani memilih demokrasi sebagai pilihannya tentu saja. Pilihan ini tentulah tepat dikarenakan Indonesia dirancang dan dibuat oleh rakyat, bukan raja atau dari sebuah garis keturunan (dinasti politik), akan tetapi melalui berbagai kekuatan politik rakyat yang diwakili oleh kaum muda (pelajar dan mahasiswa) jauh sebelum kemerdekaan. Sebut saja gerakan Budi Oetomo dengan Kebangkitan Nasionalnya (1908), Gerakan Sumpah Pemuda (1928) dan Proklamasi Kemerdekaan (1945). Elemen elemen penyanggah negara sebagai negara berdaulat,

memiliki idiologinya sendiri (Pancasila), memiliki bahasanya sendiri (Indonesia), memiliki pegangan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan keaneka ragamannya (Bhineka Tunggal Ika), memiliki lagu kebangsaan (Indonesia Raya), memiliki bendera sendiri (Merah dan Putih) dan semuanya itu dirancang dan dibuat oleh rakyat yang diwakili oleh para pelajar, pemuda, dan mahasiswa (Kaum terpelajar).

Fakta sejarah tersebut, memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia, bahwa pilihan demokrasi adalah tepat menuju pada negara kesejahteraan yang dicita citakan, dengan catatan bahwa *From the people, by the people, for the people* (Abraham Lincoln) dijadikan sebagai konsep dasarnya, dan relevan untuk dapat dipadukan melalui ideologi negara dan peta politik pemerintahan menuju cita-cita tersebut. Olehnya itu ideologi negara dan peta politik pemerintahan idealnya, haruslah memiliki orientasi terhadap kesejahteraan sosial. Indonesia yang memiliki ideologi berkarakter keadilan sosial (Pancasila dengan sila kelimanya), dan komitmen sebagai negara kesejahteraan (welfare state) yang menitikberatkan pada kepentingan kesejahteraan warga negaranya memiliki alasan yang kuat untuk mempraktekkan demokrasi di Indonesia secara utuh.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka/literatur. Dengan menganalisis dengan mengkomparasikan beberapa teori dan konsep terkait.

HASIL DAN DISKUSI

Negara kesejahteraan pada prinsipnya memiliki tujuan utama yakni memperkecil gap sosial dikarenakan oleh kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan melalui berbagai usaha pelayanan kesejahteraan kepada warga negaranya. Terhadap pencapaian tersebut ada 5(lima) prinsip dasarnya yakni (1) Cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi ini agar seluruh masyarakatnya dapat menjangkaunya, dan tidak malah memberatkan bebannya misalnya listrik, gas dan minyak bumi,

air bersih, dan angkutan umum yang murah, (2) Usaha-usaha swasta yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara berhak melakukan pengaturan yang ketat, untuk menghindari terjadinya monopoli yang akan mendistorsi pasar, hingga merugikan rakyat, (3) Negara terlibat langsung dalam usaha-usaha kesejahteraan rakyatnya, misalnya dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan (menjadi keharusan yang tidak dapat diabaikan) dan dapat dijangkau oleh semua orang tanpa terkecuali. Jumlah jenis layanan langsung harus disediakan oleh negara mengikuti perkembangan kemampuan negara. (4) Mengembangkan perpajakan negara kesejahteraan yang lebih progresif, dan (5) Pembuatan kebijakan publik harus dilakukan secara demokratis, yakni mengelola negaranya secara demokratis.

Negara kesejahteraan menurut J.M.Keynes adalah negara yang pemerintahannya menjamin tersenggaranya kesejahteraan rakyat dengan 5 (lima), prinsip dasarnya yakni; (1) demokrasi (Democracy), (2) Penegakan hukum(Rule of law), (3) Perlindungan hak Azasi Manusia, (4) keadilan sosial (social Justice) dan (5) anti diskriminasi.

Di negara barat, negara kesejahteraan sering dianggap penawar “racun” kapitalisme dari dampak negatif ekonomi pasar bebas. Bahkan welfare state sering disebut “kapitalisme baik hati” di negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru (beberapa negara penganut welfarestate). Menurut J.M Keynes dan Smith (2006) bahwa, sesungguhnya ide dasar sejak abad ke 18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasannya tentang pemerintahan yang bertanggung jawab menjamin the greatest happiness atau welfare of the greatest number of their citizens.

Bentham dengan konsep utility (kegunaan) sebagai penjelasan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Menurutnya aksi-aksi pemerintahan haruslah selalu mengarah pada peningkatan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai kesejahteraan membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan negara (father of welfare states).

Negara kesejahteraan dan kesejahteraan sosial, adalah merupakan tujuan pokoknya. Kesejahteraan sosial merujuk pada terciptanya keadaan masyarakat yang terpenuhi kehidupan yang layak bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Demi kesejahteraan sosial maka negara wajib meyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan (lihat UU No. 11 tahun 2009). Kesejahteraan sosial, merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang dasar 1945 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Amanat Undang-Undang dasar ini memberikan kekuatan pada seluruh warga negara, bahwa negara harus terlibat untuk menyelesaikan kemiskinan, dengan segala ketidakadilan demi kehidupan sosial, agar warga negara dapat hidup layak dan bermartabat. Kondisi tersebut, haruslah memiliki keterkaitan dengan keterpenuhan kebutuhan material, spritual dan sosial warga negaranya, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun tujuan kesejahteraan sosial (Pasal 3 UU No.11/2009) adalah: (1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, (2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, (3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan mengani masalah kesejahteraan sosial, (4) Meningkatkan kemampuan, keperdulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan dan (5) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Negara kesejahteraan, memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimaksud, ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan

prioritas kepada mereka yang tak memiliki kehidupan layak secara kemanusiaan, dan memiliki masalah sosial. Masalah sosial sebagai contoh, adalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan/dissabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana/korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dengan demikian jelaslah bahwa negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial.

Demokrasi Sebagai Pilihan

Negara kesejahteraan, keadilan sosial dan kesejahteraan sosial dalam beberapa prinsipnya secara eksplisit memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai demokrasi sebagai jalan, yang harus ditempuh menuju tujuan, ketika demokrasi dipahami sebagai sebuah kerja kultural, sosial dan politik, tidak hanya berbicara tentang membangun pranata politik saja seperti pemilihan umum, dewan perwakilan rakyat, partai politik, otonomi daerah, desentralisasi dan lain-lain, akan tetapi demokrasi secara utama juga berbicara lebih luas yakni, tentang mental, spirit sebagai core values yakni, toleransi, kesamaan, kebebasan, keberadaban, martabat, dan lain lain yang lebih mengarah pada kehidupan sosial.

Demokrasi bukanlah hanya sebagai demokrasi prosudural, akan tetapi lebih dari pada itu, demokrasi hendaknya dipahami sebagai sebuah proses pendidikan yang bersifat alami, memerlukan komitmen, konsistensi dan kesungguhan untuk membangun demokrasi yang sehat yang lebih berefek kepada kesejahteraan sosial, dalam arti yang luas.

Namun penerapan demokrasi di Indonesia (dari beberapa hasil riset) menunjukkan bahwa demokrasi yang ada melalui kebijakan otonomi daerah, kebebasan pers, meningkatnya peran parlemen, pemilu yang bebas aktif, dan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemimpin daerah (propinsi, Kabupaten dan Kota) secara langsung belum memiliki dampak yang terlihat jelas bagi masyarakat. Tingginya angka penduduk miskin, pengangguran, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan merupakan cerminannya. Kemorosotan karakter bangsa dan maraknya korupsi diseluruh wilayah nusantara membuat Jokowi (diawal pemerintahannya) meneriakkan revolusi mental

dalam mengubah Indonesia. Demikian juga dengan maraknya pornografi, kekerasan diberbagai elemen, narkoba, pemerkosaan, konsumtif, melemahnya nasionalisme dan lain sebagainya, memunculkan pertanyaan apakah penerapan demokrasi memiliki efek terhadap kesejahteraan sosial di negara yang menganut sistem negara kesejahteraan?

Banyak fakta membuktikan (Larry Diamond, riset indeks demokrasi Asia 2011) bahwa capaian pembangunan demokrasi di Indonesia (sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia) mencapai 67,30% di tahun 2011 (dibandingkan dengan negara Asia Selatan), namun disisi lain angka kemiskinan di tahun setelahnya (2012) mencatat lebih 30 juta jiwa penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan, pada tahun 2013 adalah 28,07 juta jiwa hingga 2016 kemiskinan tembus 28,51 juta. Beralasan dari sini dapatlah menjadi salah satu indikator, bahwa meskipun demokrasi mencapai presentase diatas 50 % dibanding dengan negara Asia selatan yang menjadi perbandingan, akan tetapi belumlah mendapat hasil maksimal terhadap kesejahteraan. Kondisi ini membawa kita melakukan perbandingan kepada negara tetangga lainnya sebut saja Singapura, China dan Malaysia yang memiliki cukup kesejahteraan sosial yang memadai dengan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan, walaupun secara politis kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi sangatlah dibatasi oleh pemerintah. Namun yang unik adalah ketiganya hampir memiliki kesamaan yakni tingkat pendidikan yang merata, yang dimiliki oleh warga negaranya. Artinya ketiga negara tersebut, memberi dukungan serius terhadap pendidikan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai contoh China menganggarkan anggaran dari jumlah APBN untuk pendidikan sebesar 20 % tapi disertai dengan keseriusan mengelolanya. Yang menarik adalah Indonesia juga meberikan hal yang sama terhadap pendidikan yakni 20 persen, sayangnya anggaran ini tidak kemudian disertai dengan keseriusan yang memadai untuk mengelolanya, sehingga tidak terlihat efek yang signifikan dengan tujuannya. Malahan pendidikan menjadi arena pasar yang kian marak, sehingga banyak kaum miskin yang tak bisa meraih pendidikan yang diinginkan. Kondisi ini menambah mirisnya bahwa antara cita-cita dan fakta negara

kesejahteraan dan kesejahteraan sosial dengan demokrasi bertentangan.

Fakta tersebut tampaknya menggiring pertanyaan adalah, benarkah demokrasi tidak selalu menjadi jalan menuju kesejahteraan sosial yang dimaksudkan, lalu mengapa demokrasi yang menjadi pilihan bangsa Indonesia, belum atau bahkan tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang dimaksudkan? Tapi pertanyaan kemudian terbantahkan, karena wujud demokrasi yang mendatangkan kesejahteraan juga dapat dijumpai di negara negara seperti Amerika Serikat, dan beberapa negara di daratan Eropah lainnya, dan mereka sukses menemukan formulanya. Kedua fakta tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa sistem politik yang berbeda bukanlah hal yang utama untuk mencapai kesejahteraan sosial, akan tetapi tergantung komitmen dan keseriusan negara yang bersangkutan.

Kini tiba dalam sebuah kenyataan, bahwa ketika demokrasi sebagai sebuah pilihan, tidak ada jalan lain, yakni membangun komitmen seluruh bangsa, untuk bersama sama membangun demokrasi secara serius dan membawa kearah yang benar. Dibutuhkan sebuah perjalanan panjang untuk mencapainya. Kondisi Indonesia pasca reformasi menjadi titik awal perjalanan yang sesungguhnya dan harus dikongkritkan. Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, kesejahteraan sosial harus diurai kembali untuk mencari formulanya yang tepat. Konflik politik diberbagai wilayah dan masalah korupsi serta masalah lainnya membuat langkah demokrasi semakin terpuruk. Belum lagi letak geografis Indonesia yang tidak terintegrasi, kemajemukannya yang menabuh kompleksnya masalah.

Tampaknya, sungguh tak dapat dihindari bahwa perkembangan peningkatan kesejahteraan sosial rakyat, dijadikan barometer berlangsung tidaknya sebuah sistem politik dalam sebuah negara, termasuk demokrasi. Artinya proses demokrasi tak bisa dikatakan baik jika kesejahteraan sosial belum mencapai tujuannya, terlebih jika sebagai penganut negara kesejahteraan (*welfare state*). Jika demokrasi sebagai sebuah sistem politik pemerintahan, dan menjadi sebuah pilihan, lalu kemudian tidak menghasilkan, atau tidak memberi dampak positif terhadap kesejahteraan

sosial, di negara yang menganut sistem negara kesejahteraan seperti Indonesia, maka bukan tidak mungkin warga negara akan apatis, dan mencari sistem yang lain yang mungkin dapat menjadi uji coba. Akan tetapi jika ini dilakukan, maka Indonesia akan mengalami kegagalan perjuangan demokrasinya yang sudah dipilih sejak kemerdekaannya. Tentulah menjadi hal yang menyedihkan apabila kita melangkah mundur, sementara negara lain telah menikmati hasil perjuangan demokrasinya. Keadaan ini, tentu saja memaksa semua pihak baik state, private maupun civil society untuk bergandengan tangan mempraktekkan demokrasi dengan benar, agar kesejahteraan sosial benar benar menjadi kenyataan.

KESIMPULAN

Demokrasi tentu bukanlah sistem politik maupun pemerintahan pilihan satu-satunya, yang dapat dianggap[terbaik menuju kepada kesejahteraan sosial. Akan tetapi, demokrasi pun tak bisa terbantahkan sebagai sebuah sistem yang lebih banyak di gandrungi pasca runtuhnya Uni Soviet melawan negara Super Power Amerika Serikat, dan kemudian dunia kian menjadi satu melalui globalisasi, dan demokrasi menjadi the best sistem. Demokrasi kemudian menjadi alat atau sarana yang memungkinkan untuk mencapai kemanusiaan yang lebih baik karena didalamnya mengandung nilai keadilan dan kebebasan (*freedom*). Demokrasi pun menjadi sintesis dari sistem pemerintahan sebelumnya dan secara historis banyak mencatat kemenangannya.

Indonesia, bukan karena globalisasi lalu memilih demokrasi, sejak kemerdekaan Indonesia menjatuhkan pilihannya pada negara demokrasi dalam berbagai versinya, dan mengamanatkan kepada negaranya sebagai negara kesejahteraan yang benar-benar negara bekerja untuk kesejahteraan sosial rakyatnya (lihat Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal yang mengurainya). Sayangnya perjalanan selalu tidak sesuai dengan cita-cita. Reformasi menjadi awal kebangkitan kembali untuk memperjuangkan demokrasi. Demokrasi adalah sebuah langkah perjuangan, dengan berbagai strategi yang harus dibuat, duduk bersama-sama memadukan visi membangun komitmen, agar demokrasi mendapatkan formula yang benar, agar bangsa yang besar ini tak salah langkah. Demokrasi

bukanlah perjalanan pintas atau instan, akan tetapi perjalanan yang panjang yang harus dilalui dengan berbagai dinamika, kesabaran dan saling mendukung, dan bukan saling memerangi antara satu dengan yang lain. Memerlukan komitmen kuat dan serius oleh semua pihak.

Ketika demokrasi sebagai pilihan, maka penguatan terhadap kelembagaan harus menjadi keharusan. Karena hanya pada penguatan kelembagaan yang fokus pada demokrasi, yang dapat melakukan pendampingan secara terus-menerus tanpa henti, dengan berbagai strateginya untuk mencapai demokrasi yang diinginkan. Demokrasi bukan hanya slogan, akan tetapi menjadi fakta sebagai jalan menuju kearah kesejahteraan sosial, agar negara kesejahteraan benar-benar dapat tepat sasaran, dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Kegagalan demokrasi, bukan tidak mungkin membawa bangsa Indonesia terpuruk, dan mundur kebelakang. Demokrasi sebagai sistem politik pemerintahan, bukan hanya sebagai pilihan akan tetapi adalah kebutuhan, karena didalamnya mengandung banyak nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan bersuara, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi yang menjadi dasar kemanusiaan yang menjadikan demokrasi memiliki keunggulan kemanusiaan.

REFERENSI

- Arifin, Indar, 2010, Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik, Makassar, Refleksi
- Budiardjo Meriam, 1996, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parelementer dan demokrasi Pancasila, Jakarta Gramedia.
- _____, 1976 Dasar Dasar Politik, Jakarta Gramedia.
- Fumihiko Saito (editor), 2008, Foundations for Local Governance ; Decentralization in Comparative
- Gaffar, M. Janaedjri, 2013, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Press
- Perspective, Heidelberg, Physica-Verlag.
- Indeks Demokrasi Asia, Potret Indonesia, 2011, Pusat Kajian politik Departemen Ilmu Politik Fisip (Puskapol) dan Center for democracy and Human Rights (Demos).
- Hans J. Morgenthau, 2010, Politik Antar Bangsa (Terjemahan), Jakarta, Yayasan Pustaka Obor
- Huntinton, Samuel, 1991, The Third Wave

- Democratization in the late 21th Century.
- Koswara, E, 2001, Otonomi daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Jakarta: Yayasan Fariba.
- Lipset, Seymour Martin , 1969, Political Man: The Social Bases of Politics. Bomaby: Vakils, Feffer and Simons Private Ltd.
- Lloyd, Cristophe(ed), teory Sosial dan Praktek Politik, Jakarta, Rajawali.
- Marsh,D.C. The Welfare State: Concept and Development, 1980, London and New York, Logman.
- Ramses M Andy , La Bakry (Editor), Politik dan Pemerintahan Indonesia,2009 Jakarta, MIPI.
- Ravitch Diane, 2005, Demokrasi Klasik dan Modern,Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Robert A.Dahl, 1971, Policarcy; Participation and oppoositions (New Haven ; Yale University Press
- Ubaedillah.A dan Abdul Rozak (editor), 2008, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat madani, Jakarta, ICCE, Prenada Media Group.
- Dokumentasi
- Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
(<https://id.wikipedia.org/wiki/>)
- Undang Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(<https://www.kemsos.go.id>).